KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan Gedung Baru DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A5

Pembangunan Gedung Baru DPR Berpotensi Rugikan Rakyat

Jika Pemerintah Menolak, Proyek Tak Jalan

[JAKARTA] DPR telah merencanakan anggaran pembangunan gedung baru senilai Rp 2,7 triliun secara *multiyear*. Dalam RAPBN 2016, rencananya akan dimasukkan Rp 700 miliar.

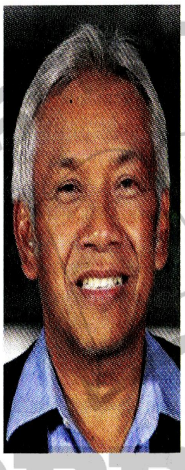
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mempertanyakan dana pembangunan gedung baru DPR dari alokasi APBN tersebut.

"Ternyata Fitra menemukan, dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal," kata Yenny Sucipto saat dihubungi *SP*, di Jakarta, Kamis (27/8).

Jika dana optimalisasi ini diambil, lanjut Yenny, maka berdampak pada daerah-daerah. Khususnya, peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok akan terhambat. "Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat," katanya.



Yenny Sucipto



Agus Hermanto

FOTO-FOTO: DOK SP

Selain itu, dia menambahkan, hingga kini belum jelas, Rp 2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja. Potensi penggelembungan *(mark up)* pun diprediksi sangat tinggi.

Uang triliunan rupiah itu, sambungnya, juga semakin menambah defisit negara yang totalnya mencapai Rp 278 triliun. Untuk itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, ada aroma 'busuk' yang sedang terjadi dalam pengusulan pembangunan gedung baru DPR.

"Sebenarnya makin kelihatan aroma permainan dari rencana pembangunann7 megaproyek DPR tersebut. Gencarnya promosi dari sejumlah anggota DPR ternyata tak sejalan dengan proses standar pengusulan program di DPR," kata Lucius, Rabu (26/8).

Dia menduga, bisa jadi terkait rencana pembangunan gedung baru hanya disain oleh satu dua orang atau sekelompok orang di parlemen dan kesetjenan DPR.

Usulan

Sementara itu, unsur Pimpinan DPR tetap tak mau mengeluarkan usulan pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, walau sebagian anggota dewan menilai posisi keuangan negara sedang tak dalam kondisi prima untuk dimintai pembiayaannya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, pembangunan gedung baru DPR itu diusulkan oleh sejumlah pihak di DPR.

> **"Ternyata Fitra menemukan, dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal.**

Usulan itu harus masuk ke nota keuangan Pemerintah, yakni dalam pembahasan RAPBN 2015. Tapi Agus tak menyatakan bersedia menarik usulan itu. Namun, malah menegaskan bahwa program itu takkan terjadi bila pemerintah menolaknya.

"Suatu program, apabila pemerintah tidak menyetujui, ya mungkin tidak bisa terlaksanakan. Sehingga kita lihat saja prosesnya, biar prosesnya berjalan. Apabila memang pemerintah bisa melihat urgensi dan juga menyetujui ini, baru bisa jalan," kata Agus, Rabu (26/8).

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki dana untuk membangun gedung baru DPR, yakni dari pos optimalisasi anggaran.

Dia berjanji akan terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan pembahasan usulan yang belum disetujui pemerintah itu. [MJS/W-12]